

BULETIN

BIOENERGI

Edisi April 2019

www.sprobi.or.id



B20
Biodiesel 20%
Untuk Ban...

B20
Biodiesel 20%
Dan Negara

**INDONESIA
BERSATU
HADAPI EROPA**

BULETIN BIOENERGI

Penanggung Jawab

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia
(APROBI)

Dewan Redaksi

Pengurus APROBI

Alamat Redaksi

Multivision Tower, Lantai 11,
Jl Kuningan Mulia Lot 9B

Buletin ini diterbitkan oleh
Asosiasi Produsen Biofuels
Indonesia (APROBI)



Redaksi menerima kiriman artikel opini, naskah berita, foto, dan karikatur. Naskah bisa dikirimkan melalui pos ke Alamat Redaksi atau melalui email: office@aprobi.or.id. Redaksi berhak mengedit dan mengubah tulisan tanpa mengubah makna dari tulisan tersebut.

Biofuelpedia

Gas Rumah Kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia. Gas rumah kaca yang paling banyak adalah uap air yang mencapai atmosfer akibat penguapan air dari laut, danau dan sungai. Karbondioksida adalah gas terbanyak kedua. Ia timbul dari berbagai proses alami seperti: letusan vulkanik; pernapasan hewan dan manusia yang menghirup oksigen dan menghembuskan karbondioksida, dan pembakaran material organik seperti tumbuhan.

(Wikipedia)

EROPA DISKRIMINASI SAWIT

Pembaca yang terhormat,

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) menerbitkan buletin Bioenergi pada bulan April 2019. Buletin yang mulai dipublikasikan pemajak pertengahan tahun 2016 ini menginformasikan perkembangan terkini di industri biodiesel dan pada umumnya industri sawit.

Rubrik Laporan Utama, mengangkat keputusan Komisi Uni Eropa yang mengusulkan pembatasan dan penghapusan minyak sawit sebagai bahan baku biofuel pada 2030. Keputusan ini mendapatkan reaksi dari pemerintah Indonesia yang menilai Delegated Act RED II sangat diskriminatif. Mengingat, selama ini Indonesia menjadi mitra strategis bagi Uni Eropa dalam berbagai aspek. Untuk menghadapi Eropa, pemerintah melakukan berbagai upaya supaya untuk membela sawit sebagai komoditas strategis bangsa.

Di Rubrik Tamu Kita, kami edisi ini mewawancarai Peter Gontha, Staf Khusus Menteri Luar Negeri RI berkaitan langkah Uni Eropa yang menghambat perdagangan

sawit. Pemerintah sudah bagus dalam berdiplomasi untuk memenangkan kepentingan nasional menyangkut industri kelapa sawit ke dunia luar. Oleh karena itu, seluruh komponen masyarakat bisa lebih bersatu untuk kampanye mengenai pentingnya sawit demi kepentingan nasional yang lebih besar.

Pembaca, kami harapkan buletin Bioenergi membantu penyebaran informasi positif mengenai peranan biodiesel kepada negara ini. Dengan begitu dukungan masyarakat terhadap industri biodiesel dapat terus meningkat dan memahami pentingnya kehadiran industri bioenergi. Selamat membaca.



PEMERINTAH KAJI HARGA GREEN DIESEL

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memperkirakan harga minyak diesel yang terbuat dari 100 persen minyak sawit (D100/ green diesel) jika dipasarkan saat ini dapat mencapai sekitar Rp14 ribu per liter. Perkiraan harga tersebut dengan asumsi 1 ton minyak sawit mentah (CPO) dapat menghasilkan 700 liter D100.

“Kalau sekarang (konversi) itu dilakukan dengan produksi 200 ribu sampai 300 ribu barel per hari kira-kira Rp14 ribu per liter. Kalau Rp14 ribu bisa dijual ke siapa?,” ujar Jonan dalam Forum Diskusi Energi Untuk Kedaulatan Negeri di Jakarta, Selasa (2/4).

Dengan harga yang mencapai Rp14 ribu per liter, konsumen potensial untuk D100 saat ini adalah konsumen minyak solar nonsubsidi Pertamina Dex. Saat ini, harga Pertamina Dex di Jabodetabek

dibanderol PT Pertamina (Persero) seharga Rp11.700 per liter.

“Nanti akan kami coba (konversi). Bukan hanya untuk masalah perubahan iklim tetapi juga masalah keberlanjutan lingkungan itu sendiri,” ujarnya.

Jonan menyebutkan konversi minyak kelapa sawit menjadi minyak diesel ramah lingkungan akan dilakukan oleh Pertamina pada Kilang Dumai, Riau dan Kilang Plaju, Sumatera Selatan dalam dua tahun ke depan. Kapasitas total kedua kilang tersebut dalam memproduksi D100 bisa mencapai 200 ribu hingga 300 ribu bph.

Ia mengingatkan, selain ketersediaan, pemerintah dalam menyediakan energi juga memperhatikan aspek keterjangkauan oleh masyarakat. Karenanya, faktor daya beli menjadi krusial. Untuk itu, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mendorong badan usaha untuk mencari cara agar bisa menekan biaya produksi bahan bakar ramah lingkungan.



Komite Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang berdiri delapan tahun lalu telah menerbitkan sejumlah 502 sertifikasi terdiri dari 493 perusahaan, 5 koperasi swadaya, dan 4 Koperasi Unit Desa (KUD) plasma. Luas perkebunan sawit bersertifikat ISPO mencapai 4.115.434 hektar. Terdiri dari tanaman menghasilkan seluas 2.765.569 hektar dengan total produksi Tandan Buah Segar (TBS) 52.209.749 ton per tahun dan mampu memproduksi minyak mentah sawit atau Crude Palm Oil (CPO) 11.567.779 ton per tahun dan produktivitas 18,81 ton per hektar dan kadar rendemen rata-rata 22,23 persen.

KOMISI ISPO TELAH TERBITKAN 502 SERTIFIKAT

“Sertifikasi ISPO yang diterbitkan setiap tahunnya terus bertambah. Capaian itu menjadi bukti bahwa ISPO sebagai penyelamat lingkungan,” ujar Ketua Komisi ISPO, Aziz Hidayat, dalam acara 3rd International Conference and Expo on Indonesia Sustainable Palm Oil (ICE-ISPO), Rabu (27 Maret 2019), di Jakarta.

Dengan sertifikasi ISPO yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian diharapkan bisa menyangkal tuduhan industri sawit perusak lingkungan. Selain membagikan sertifikasi ISPO kepada perusahaan sawit dan koperasi, komite ISPO juga memberikan penghargaan pada tokoh-tokoh yang telah berjasa dalam merancang dan mengembangkan sistem sertifikasi ISPO.

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kementerian Perdagangan Kasan Muhri menegaskan pentingnya sertifikasi ISPO bagi kalangan pelaku usaha sawit. Standar ISPO ini sudah mencakup ketentuan domestik maupun internasional. Sehingga, sangat penting supaya bisa mendorong perbaikan di sisi hulu kelapa sawit.

Pemerintah, legislatif, pengusaha, dan petani bersatupadu mencegah penghapusan minyak sawit untuk biofuel di Uni Eropa. Diskriminasi ini berpotensi merugikan neraca perdagangan dan imej sawit di pasar global.

“Kita bisa retaliasi, tidak mengatakan ini perang dagang. Tapi retaliasi saja. Artinya kalau you larang 10, kita lawan 10 juga,” tegas Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI, saat berbicara dengan awak media di Kantor Wakil Presiden, Maret 2019.

Pernyataan ini diungkapkan Jusuf Kalla setelah keluarnya keputusan Komisi Uni Eropa yang mengusulkan penghapusan minyak sawit sebagai bahan baku biofuel secara bertahap mulai 2023. Sebagaimana telah diketahui bahwa komisi Uni Eropa menyerahkan Delegated Act Renewable Energy Directive (RED) II kepada Parlemen Uni Eropa. Keputusan ini diambil Komisi Uni Eropa yang menilai kelapa sawit tidak sustainable dan beresiko tinggi terhadap deforestasi berdasarkan penghitungan mereka.

Jusuf Kalla menyatakan keputusan yang diambil Uni Eropa terhadap produk sawit Indonesia merupakan permasalahan serius. Jika pelarangan terjadi, maka kebijakan ini harus dilawan. “Kalau ini (sawit) diboikot tentu Indonesia mempunyai kekuatan pasar juga, dapat retaliasi kalau memang bukan tidak mau beli,” ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden.



DIPLOMASI MENGHADANG DISKRIMINASI SAWIT DI EROPA

Jusuf Kalla mencontohkan, “Kita bisa buat retaliasi yang sama. Jika seperti itu, oke tidak beli Airbus lagi, itu hak kita juga. Kalau Uni Eropa memiliki hak membuat aturan, kita juga punya hak bikin aturan,” lanjut Kalla.

Di tempat terpisah, Menko Perekonomian RI, Darmin Nasution dan Menko Kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjaitan kompak memberikan pernyataan bersama terkait keputusan Eropa. “Presiden sudah kasih statement keras soal ini. Uni Eropa mesti melihat juga kaca mata kami, kalau Presiden tidak bela ini, lalu kami bela rakyat kami bagaimana?,” jelas Menko Luhut.

Menko Luhut mengaku bingung dengan perilaku dari Uni Eropa, padahal pihaknya sudah sering berkomunikasi. “Kami sangat

kompak. Dua Menko ini tidak bisa paham bisa sebegini kencang. Padahal kami sudah kesana, nanti akan dibawa ke WTO,” ujarnya.

“Jika kita didiskriminasikan begini dan hampir sekitar 20 juta rakyat kita terutama petani kecil ikut terdampak, tentu kita akan bereaksi. Apalagi kita bukan negara miskin, kita negara berkembang dan punya potensi yang bagus. Tidak ada toleransi. Ini untuk kepentingan nasional,” tegas Menko Luhut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution kembali menyampaikan posisi keras Pemerintah RI dalam menanggapi dirilisnya konsep Delegated Act RED II oleh Komisi Eropa tersebut.

Bagi Indonesia, lanjut Darmin, kelapa sawit merupakan komoditas



yang sangat penting, yang tercermin dari nilai kontribusi ekspor Crude Palm Oil (CPO) senilai USD 17,89 miliar pada tahun 2018. Industri ini berkontribusi hingga 3,5% terhadap Produk Domestik Bruto. Industri sawit juga menyerap 19,5 juta tenaga kerja, termasuk 4 juta petani kelapa sawit di dalamnya.

Selain itu, kelapa sawit juga menjadi bagian penting dalam strategi pemenuhan kebutuhan energi nasional menggantikan bahan bakar fosil. "Dengan peranan kelapa sawit tersebut, jelaslah bahwa kelapa sawit mempunyai peranan yang penting dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, yang juga merupakan prioritas pertama dalam pencapaian SDGs 2030," tegas Menko Perekonomian.

Impor Produk Sawit Uni Eropa Periode 1999-2018 (000 Ton)

Tahun	Impor	Rata-rata Pertumbuhan
2001	2978	3.22 %
2002	3006	0.94 %
2003	3411	13.47 %
2004	4031	18.18 %
2005	4276	6.08 %
2006	4339	1.47 %
2007	4967	14.47 %
2008	5509	10.91 %
2009	5442	-1.22 %
2010	4944	-9.15 %
2011	5707	15.43 %
2012	6812	19.36 %
2013	6969	2.30 %
2014	6935	-0.49 %
2015	6717	-3.14 %
2016	7219	7.47 %
2017	6941	-3.85 %
2018	6800	-2.03 %

Sumber: Indexmundi

Menko Darmin menggarisbawahi hubungan baik antara Indonesia dan Uni Eropa yang sudah terjalin sejak lama, terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini terefleksi dalam perdagangan dan investasi.

"Presiden RI juga telah menyatakan keprihatinannya pada hubungan perdagangan dan investasi dengan Uni Eropa jika kebijakan diskriminasi terhadap sawit ini berlanjut," katanya.

Kalangan legislatif juga bereaksi atas keputusan Uni Eropa ini. Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI menyurati Presiden Parlemen Eropa Antonio Tajani. Dalam suratnya, ia menyatakan kecewa dan tidak setuju terhadap skema Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Act yang diajukan oleh Komisi Eropa.

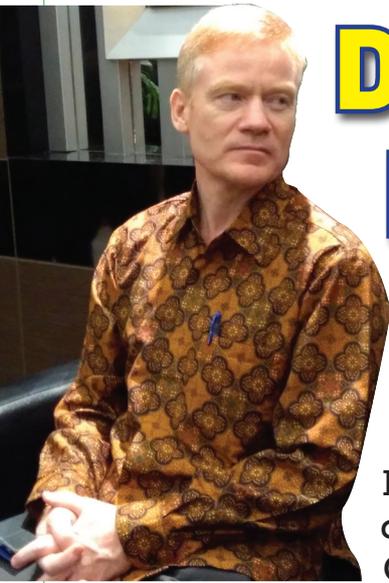
"Proses adopsi legislasi RED II dan aturan turunannya didasarkan pada analisis ilmiah yang cacat, mengabaikan kritik yang datang dari internal Uni Eropa dan lembaga independen. Serta mengabaikan concern dan data-data yang disampaikan oleh negara-negara produsen kelapa sawit," tegas Bambang Soesatyo.

Bamsuet DPR RI mendukung pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah tegas, termasuk mengajukan RED II dan Delegated Regulation ke World Trade Organization (WTO) dan langkah lainnya. "Kebijakan Uni Eropa terhadap kelapa sawit bukan untuk pelestarian lingkungan, melainkan sebagai upaya proteksi terselubung melindungi produk minyak nabati mereka yang daya saing dan produktivitasnya jauh lebih rendah daripada minyak kelapa sawit," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah aktif menggandeng berbagai pihak seperti kalangan dunia usaha dalam rangka membahas strategi menghadapi Eropa. Hampir tiap minggu rapat digelar baik Kemenko Perekonomian dan Kemenko Kemaritiman. Dalam rapat tersebut sempat dibahas melayangkan gugatan melalui World Trade Organization (WTO). Pemerintah juga meminta para pengusaha untuk melawan jalur hukum.

"Kami (APROBI) mendukung setiap langkah yang diambil pemerintah," ujar MP Tumanggung, Ketua Umum APROBI.

Joko Supriyono, Ketua Umum GAPKI, menuturkan kebijakan diskriminasi Eropa perlu dihadapi dengan lobi dan litigasi, serta di bawah satu koordinasi. "Dunia usaha tidak bisa melakukan sendiri, perlu dukungan pemerintah dan semua pihak. Saat ini penting sekali melakukan konsep tersebut paralel," ujarnya. (*)



DUBES EROPA MINTA BOIKOT DIHINDARI

“Kita dapat menemukan solusi yang menguntungkan dan berkelanjutan. Boikot membuat kita sama-sama rugi,” kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Guerend pada Maret 2019.

Vincent Guerend mengingatkan langkah boikot produk Eropa tidak menyelesaikan masalah. Malahan dapat dapat merugikan seluruh pihak terkait keputusan Komisi Eropa yang mengusulkan penghapusan minyak sawit untuk bahan baku biofuel.

Pernyataan ini diungkapkan Vincent menanggapi opsi boikot produk Eropa. Pemerintah Indonesia merasa geram karena Delegated Regulation EU Renewable Energy Directive II (RED II) berpeluang mendiskriminasi produk sawit asal Indonesia.

Vincent mengusulkan supaya pemerintah Indonesia mengadukan persoalan yang dihadapi kepada World Trade Organisation (WTO). Langkah ini dapat ditempuh apabila pemerintah tidak sepakat dengan keputusan Uni Eropa. “Dalam pandangan saya walaupun ada ketidaksepahaman dalam perdagangan, sebaiknya diuji di WTO. Langkah ini merupakan jalan yang benar. Di dunia mana pun, setiap perselisihan (dagang) sebaiknya selesaikan di WTO,” ucap Vincent.

Selama ini, Eropa memberikan perlakuan bagus terhadap produk

sawit asal Indonesia. Kebijakan yang dilakukan bersifat bebas dan terbuka. Sekitar 65 persen produk sawit Indonesia masuk ke Eropa dengan bea masuk nol persen.

Adapun, sekitar 35% produsen sawit dibebani tarif masuk antara 5 hingga 10 persen, lebih rendah dari bea masuk ke India yang mencapai 40 persen. Vincent menekankan Kerangka kebijakan RED II ditujukan kepada produk sawit bagi kebutuhan biofuel, tetapi tidak termasuk produk turunan lain.

Ditekankan Vincent bahwa Uni Eropa tidak berniat melakukan proteksionisme melalui pengesahan RED II. Karena, Uni Eropa mendukung perdagangan yang berbasis peraturan internasional dan WTO. Lebih lanjut kata Vincent, keputusan yang diambil Uni Eropa ingin memastikan keberlanjutan perekonomian dunia yang ramah terhadap lingkungan. Langkah itu dimulai dengan rencana pembatasan pada minyak nabati yang berasal dari kelapa sawit.

Menurutnya, memang WTO menjadi tempat pengaduan bagi negara manapun yang memiliki masalah dengan perdagangan internasional. Termasuk salah

satunya adalah Indonesia yang mengalami masalah perdagangan pada komoditas minyak sawitnya.

“Jika tidak setuju dengan sebuah perjanjian perdagangan, memang langkah terbaiknya adalah membawanya ke WTO,” ucapnya.

Itu sebabnya Eropa ingin mendorong praktik sawit berkelanjutan di Indonesia. “Pemerintah Indonesia ingin minyak kelapa sawit berkelanjutan dan kami menyambut itu melalui moratorium, peremajaan, dan revisi sertifikasi internasional minyak sawit berkelanjutan (ISPO),” ujarnya.

Ia pun membantah jika selama ini pihaknya melakukan diskriminasi terhadap produk minyak sawit asal Indonesia. Justru menurutnya, tidak ada sama sekali niatan bagi Uni Eropa untuk melakukan kampanye hitam terhadap produk minyak sawit karena menurutnya UE merupakan pasar terbuka. “Tidak sama sekali. Kami sudah mengatakan kepada Anda bahwa kami merupakan pasar yang terbuka,” katanya.

Guerend menerangkan revisi kriteria RED II dilakukan paling cepat 2021. Pada 2023, di saat Eropa memiliki gambaran yang lebih baik, Guerend menyebutkan Eropa akan merevisinya. “Sistem ini (RED II) dinamis, akan berubah lagi pada 2021-2023,” pungkasnya. (*)

PEMERINTAH DAN PENGUSAHA SOLID HADAPI EROPA

Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia mengusulkan langkah terpadu dalam menghadapi kebijakan diskriminasi sawit di Uni Eropa.

Renewable Energy Directive (RED)II ini kelanjutan dari RED I yang diinisiasi oleh berbagai pihak. Ada perbedaan antara RED I dan RED II. Menurut Paulus Tjakrawan, Ketua Harian APROBI menuturkan RED I menitikberatkan kepada emisi. Sementara, RED II fokus masalah deforestasi. Rancangan RED II menilai penggunaan lahan kelapa sawit dari kawasan hutan terlampaui tinggi.

“Dari ukuran yang mereka (Eropa) buat, maka terbitlah usulan untuk menghapuskan penggunaan sawit. Sebab, sawit ini dinilai ILUC(red- Indirect Land Use Change) high risk. Istilah ini yang mereka pakai (sawit),” jelasnya.

Itu sebabnya, baik Indonesia dan Malaysia tidak setuju dengan kategori sawit high risk ini. Paulus mengungkapkan pendekatan ILUC ini menggunakan metodologi penghitungan yang tidak tepat dan tidak berlaku umum. Dalam laporan Komisi Eropa disebutkan bahwa 39,6% dari ekspansi produksi minyak sawit sejak 2008 menyebabkan kerusakan hutan, lahan basah atau lahan gambut, dan pelepasan gas rumah kaca yang dihasilkan. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan kedelai sebesar 8% dan 1% untuk bunga matahari dan rapeseed.

“Kami merasa didiskriminasikan karena rumusan yang digunakan itu tidak bisa berlaku umum. Serta tidak ada rumusan ILUC diakui dunia. Tafsiran yang mereka pakai

sesuai standar Eropa,” jelas Paulus.

Menurutnya dengan pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,3% per tahun. Ini berarti akan ada kebutuhan lahan untuk pembangunan perumahan dan kegiatan perekonomian.

Itu sebabnya, standar penghitungan ILUC Eropa ini tidak dapat sesuai dengan kondisi Indonesia. Berbeda dengan Eropa yang perkembangan penduduknya minus.

“Bertambahnya penduduk inilah yang menyebabkan perubahan bentuk dan fungsi lahan tetap ada. Mau itu direct atau indirect,” kata Paulus.

Oleh karena itu, keputusan Uni Eropa ini sangatlah diskriminatif. Paulus menegaskan produsen biofuel mendukung berbagai langkah yang akan diambil pemerintah. Bagi kami, langkah ini harus terpadu dengan mengoptimalkan tugas masing-masing.

“Pemerintah dapat melakukan pendekatan kepada konsil dan parlemen Eropa. Sedangkan pengusaha dapat mendekati industri biodiesel disana. Setelah ada keputusan resmi (otoritas) Eropa, barulah kita lakukan langkah selanjutnya,” jelas Paulus.



Terkait B30, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) mendukung upaya percepatan mempercepat realisasi program biodiesel 30% (B30) di akhir tahun 2019 dari rencana semula 2020. Sebab realisasi B30 akan meningkatkan penyerapan minyak kelapa sawit di pasar domestik.

Paulus Tjakrawan menuturkan program B30 dapat mendorong industri kelapa sawit memasok lebih dari 9 juta kiloliter (kl) per tahun. “Kalau B30 dijalankan berarti 30%, nah 30% dari solar yang beredar sekarang itu lebih dari 9 juta kl yang dipakai untuk B30. Kalau diserap dalam negeri sekitar sepertiga dari solar kita, pasti pasar CPO dalam negeri kita akan meningkat,” ujarnya.

Saat ini, APROBI bersama Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) serta BPPT, Pertamina, ITB, LEMIGAS, dan Gaikindo sedang mengadakan tes uji dan uji jalan untuk B30.

PENERAPAN B30 SIAP DIJALANKAN

Pemerintah akan menjalankan uji coba penerapan biodiesel sebesar 30 persen (B30). Uji coba B30 direncanakan mulai Mei 2019.



Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) FX Sutijastoto menjelaskan bahwa uji coba B30 mulai dijalankan pada Mei tahun ini dalam rangka

evaluasi sebelum uji B30 berjalan.

"Road test akan dijalankan sekitar Mei atau Juni begitu road test dulu," ujarnya pada akhir Maret 2019.

Menurutnya saat ini pemerintah dalam tahap evaluasi sebelum uji coba B30. Pemerintah juga tengah meminta masukan

dari berbagai pihak termasuk rekomendasi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Administrasi dari BPDPKS. Lagi dievaluasi, persiapan. Setelah itu dirapatkan di sini (Kemenko Perekonomian) juga," jelasnya

seperti dikutip dari media nasional.

Sutijastoto menjelaskan uji jalan memakan waktu cukup lama tetapi belum dapat dipastikan berapa lama waktu yang akan dihabiskan. Sebab, uji jalan ini tergantung kepada jarak yang diperlukan saat uji coba.

“Ujicoba ini bergantung berapa kilomernya itu, dan ini sedang proses evaluasi mau berapa kilomernya,” ujarnya.

Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) menyambut baik rencana pemerintah melakukan uji kendaraan berbahan bakar solar campuran biodiesel 30 persen (B30) pada Mei 2019.

“Kami mendukung rencana pemerintah untuk menguji kendaraan berbahan bakar B30,” kata Paulus Tjakrawan, Ketua Harian Aprobi.

Paulus menyebutkan ujicoba sangat dibutuhkan untuk menjadi bahan kajian bagi pemerintah dalam mengambil keputusan. Ujicoba serupa dijalankan juga sebelum kebijakan mandatori B20.

Menurutnya ujicoba diperkirakan menempuh jarak 40 ribu kilometer. Daerah yang ditempuh mulai dari Bandung, Cirebon, dan Guci (Tegal). “Daerah ini dipilih karena memenuhi kriteria untuk ujicoba di dataran rendah dan dataran tinggi. Termasuk daerah panas dan dingin. Kegiatan seperti ini sudah diujicobakan saat program B20 akan berjalan,” ujarnya.

Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui LEMIGAS bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Institut Teknologi Bandung melaksanakan Teknis Kajian dan Uji Jalan Penggunaan solar dengan campuran 20% biodiesel (B20) pada lokomotif PT Kereta Api Indonesia.

Secara umum, hasil uji jalan selama 6 bulan menunjukkan tidak adanya permasalahan pada mesin

lokomotif yang diujicobakan.

Di samping itu, hasil menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar B20 memenuhi spesifikasi yang ditetapkan pemerintah. Komponen filter lokomotif berfungsi dengan baik dan telah memenuhi rekomendasi Original Equipment Manufacturer (OEM) periode penggantian filter, yaitu selama 3 bulan.

Komponen-komponen yang diujikan adalah mutu bahan bakar B20, performa mesin lokomotif serta performa material komponen mesin seperti pompa bahan bakar dan injektor bahan bakar.

Pengambilan sampel bahan bakar B20 dilakukan di tiga Dipo Lokomotif yaitu Tarahan, Tiga Gajah, dan Tanjung Enim Baru. Sampel diambil dari tangki lokomotif, mobil tangki pengiriman, nosel pengisian, tangka penyimpanan dan TBBM FAME.

Uji jalan dilakukan pada dua jenis lokomotif CC205 milik PRL/EMD dan dua Lokomotif CC206 milik GE yang digandeng menarik kereta batu bara atau babaranjang. Dalam uji coba tersebut, satu unit menggunakan bahan bakar B0 dan satu unit menggunakan bahan bakar B20.

Lokomotif-lokomotif yang diuji tersebut telah menempuh jarak sejauh lebih dari 54.000 kilometer (km) untuk mesin Lokomotif Electro Motive Diesel (EMD) dan lebih dari 58.500 km untuk mesin General Electric (GE). Melalui rute pulang-pergi Stasiun Tanjung Enim - Stasiun Tiga Gajah - Stasiun Tarahan yang berjarak kurang lebih 800 km dengan waktu tempuh kurang lebih 2,2 hari.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menunjukkan penyerapan biodiesel di dalam negeri mencapai lebih dari 648.000 ton sepanjang Februari 2019 atau naik 17 persen dibandingkan Januari lalu sebesar 552.000 ton.

Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono mengatakan penyerapan CPO terjadi peningkatan setelah perluasan mandatori biodiesel 20 persen (B20) kepada non-PSO terlihat positif setiap bulan.

“Peningkatan penggunaan biodiesel berbasis CPO selain akan meningkatkan penggunaan CPO dalam negeri sekaligus akan menghemat devisa impor migas, yang selama ini nilainya sangat besar,” kata Mukti melalui keterangan tertulis di Jakarta, seperti dilansir *Antara*.

Mukti berharap dengan tingginya penggunaan CPO dalam negeri, akan mengurangi ketergantungan kepada ekspor. Selain itu, uji coba B30 diharapkan segera terlaksana dan dapat mempercepat implementasi program mandatori B30.

Menurut dia, penyerapan CPO dalam negeri juga menjadi solusi atas hambatan perdagangan yang saat ini tengah dihadapi Indonesia, dan negara produsen CPO terbesar lainnya. Sepanjang 2018, realisasi kebijakan B20 mencapai 86 persen. Data Kementerian ESDM menunjukkan penyaluran B20 di 2018 sebesar 3,47 juta kilo liter (kl) dari target penyaluran FAME sebesar 4,04 juta kl.

Rincian penyaluran B20 untuk PSO 2,72 juta kl atau 94 persen periode Januari hingga Desember 2018. Sedangkan penyaluran B20 untuk Non-PSO 758.072 kl atau 66 persen selama periode September sampai dengan Desember 2018. (*)



INDUSTRI DUKUNG RISET B50 DAN B100

Riset B50 dan B100 dijalankan pemerintah melalui lembaga penelitiannya. Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) menyambut baik penelitian ini dalam rangka membangun ketahanan energi nasional.

Di awal tahun ini, Kementerian Pertanian RI dan Pusat Penelitian Kelapa Sawit Indonesia (PPKS) menjalankan uji jalan (test drive) kendaraan berbahan bakar campuran biodiesel. Kementerian Pertanian (Kementan) RI mengembangkan bahan bakar Biodiesel B-100 atau 100 persen Biosolar. Biodiesel B-100 adalah satu bahan bakar yang tidak lagi menggunakan minyak berbasis fosil tapi dari yang lebih terbarukan seperti jagung, kelapa sawit atau lainnya.

"Impian Indonesia ciptakan

biodiesel B100 dari CPO (Crude Palm Oil -red) berhasil terwujud. Bahan bakar yang berasal dari 100 persen CPO dengan rendemennya 87 persen ini masih terus dikembangkan. Semua tidak ada campuran," demikian kata Amran saat meninjau Balai Penelitian Tanaman Industri Penyegar, Badan Litbang Pertanian Kementan, tempat pembuatan B100 di Sukabumi, Jawa Barat.

Riset ini dijalankan untuk menjawab keinginan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mencapai program Biodiesel 100% atau B100. Jokowi mengatakan program

B20 sudah berhasil dilaksanakan di Indonesia. Nantinya, secara bertahap menjadi program B100. Alhasil, Indonesia tidak perlu lagi bergantung kepada impor minyak. "Sekarang B20 sudah rampung. Lalu kita menuju B100. Sekarang ini, 30% dari total produksi kelapa sawit akan masuk ke biofuel. sudah rigid dan jelas. Kita kerjakan yang ini sehingga tidak ketergantungan minyak dan impor. Targetnya itu, Pak," kata Jokowi dalam Debat Calon Presiden pada Februari 2019.

Amran menambahkan B100 ini inovasi dari Badan Litbang Pertanian. Ingat ini B100 bukan



“Kami dari asosiasi mendukung penuh semangat dari berbagai pihak dalam pengembangan biodiesel. Selain B50 dan B100, kita tahu Pertamina sedang pengembangan green fuel. Ini sebuah perkembangan luar biasa bagus”

Paulus Tjakrawan // Ketua Harian (APROBI)

B20 atau B30. Bahan bakar B100 ini memiliki keunggulan jika diproduksi nantinya yakni lebih efisien 40 persen dibanding bahan bakar fosil. Dengan menggunakan bahan bakar fosil seperti solar, 1 liter hanya dapat menempuh jarak 9,4 kilometer, sedangkan dengan menggunakan B-100 dimungkinkan menempuh jarak hingga 13 kilometer per liter.

Selain itu, penggunaan B100 diyakini akan lebih murah, ramah lingkungan, dan dapat mensejahterakan petani sawit, serta tentunya menghemat devisa. Karenanya, adanya B100 ini dipastikan dapat memperkuat ketahanan energi nasional. “Kita punya CPO 38 juta ton. Kita ekspor 34 juta ton. Bisa bayangkan kita bisa menghemat berapa triliun. Ini adalah energi masa depan Indonesia,” terang Amran.

Peneliti Utama Bidang Ekofisiologi Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar, Kementerian Pertanian, Prof. Dr. Diby Pranowo mengatakan dari seluruh analisis, hanya satu determinan yang perlu di kaji kembali, yaitu karbon residu yang dihasilkan dari B100 CPO Sawit. Sedangkan 19 determinan lainnya sudah lolos uji.

“Sampai sekarang ini sudah memproduksi hampir dua ton dengan menggunakan reaktor biodiesel ciptaan sendiri. Produksi ini merupakan penyempurnaan parameter dengan metode Dry Oil,” jelasnya.

Diby menyebutkan

kendaraan double cabin yang sudah menempuh jarak 1.600 km menggunakan bahan bakar B100 CPO Sawit. Tidak lama lagi, setelah 2.000 km akan membongkar mesin kendaraan tersebut untuk meneliti karbon residu yang ditimbulkan.

“Ada beberapa bahan Biodiesel, misalkan dari kemiri sunan, nyamplung, pongamia, kelapa, kemiri sayur, termasuk dari biji karet,” sebutnya.

Pada Januari kemarin, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) menggandeng Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian RI dan Holding PT. Perkebunan Nusantara (Holding PTPN) untuk mengadakan uji jalan (road test) B-50. Tim *Road Test* B50 PPKS dipimpin oleh Dr. Muhamad Ansori Nasution bersama peneliti lainnya yaitu Dr. Donald Siahaan, Dr. Erwinsyah, dan Dr Tjahjono Herawan.

Dalam Laporan *Majalah Sawit Indonesia* edisi Februari 2019 disebutkan riset ini direncanakan menempuh jarak sampai 30.000 km. Akan tetapi tahap pertama uji jalan mencapai 5.000 km. Kendaraan B50 memulai perjalanannya pada 25 Januari 2019 dari Medan ke Jakarta. Muhamad Ansori menjelaskan bahwa uji jalan kendaraan B50 menggunakan dua mobil *Toyota Innova* diesel keluaran tahun 2018. Peneliti menggunakan mobil uji dan mobil kontrol sebagai metode penelitian.

Paulus Tjakrawan, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI)

mengapresiasi riset B50 dan B100 baik yang dijalankan PPKS maupun Kementerian Pertanian RI. Riset ini menjadi sangat penting dalam rangka membangun ketahanan energi nasional.

“Kami dari asosiasi mendukung penuh semangat dari berbagai pihak dalam pengembangan biodiesel. Selain B50 dan B100, kita tahu Pertamina sedang pengembangan green fuel. Ini sebuah perkembangan luar biasa bagus. Mungkin nanti dapat pula mencapai B100. Untuk itu, dibutuhkan dukungan serta kesepakatan semua pihak baik dari pemerintah, produsen, pengguna, dan peneliti. Harus dilakukan kajian yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak,” ujar Paulus.

Program uji jalan B50 tahap pertama ini telah memperoleh hasil sementara. Dalam laporan per 31 Januari 2019, Tim *B50 Road Test* 2019 menjelaskan bahwa hasil sementara menunjukkan bahwa penggunaan B50 dan B20 menghasilkan data konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang yang berbeda.

Selain itu, hasil *dyno test* menunjukkan bahwa *power* mobil yang menggunakan B50 4% lebih rendah dibanding pada mobil yang menggunakan B20. “Dari rata-rata emisi gas buang mobil uji lebih ramah lingkungan ketimbang mobil kontrol,” jelas Ansori. Data hasil sementara menunjukkan emisi yang dihasilkan kendaraan B50 rerata emisi gas buang NOx sebesar 33 ppm. Sedangkan, kendaraan B20 rerata emisi gas buang 41 ppm. (*)



Industri alat berat mendukung program mandatori biodiesel 20% atau B20. Pemakaian B20 tidak mengganggu kinerja mesin alat berat.

ALAT BERAT TETAP TANGGUH DENGAN B20

Adrianus Hadiwinata, Ketua Umum Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI) menyampaikan penggunaan bahan bakar solar campuran biodiesel 20% atau B20 tidak berdampak buruk kepada mesin. "Hingga sekarang, alat berat pengguna bahan bakar campuran biodiesel tetap berjalan bagus. Tidak ada masalah di lapangan," ujarnya.

Program perluasan B20 yang dicanangkan pemerintah semenjak 1 September 2018, juga berlaku kepada sektor industri alat berat. Adrianus menyebutkan anggota PAABI mendukung penuh mandatori B20, karena berdampak positif bagi negara. "PAABI selalu mendukung program (B20) yang bermanfaat untuk negara dan dikoordinasikan dengan baik," ujarnya.

Salah satu perusahaan alat berat ternama, Volvo Construction Equipment (CE) mendukung penuh penerapan B20. Sejauh ini, mesin unit Volvo CE mengikuti serta mendukung peraturan pemerintah tentang penggunaan B20 di industri alat berat Indonesia.

Kini, Volvo CE memastikan semua mesin dapat menggunakan bahan bakar yang mengandung 20 persen biodiesel. Volvo CE

menjadi salah satu manufaktur yang menerapkan penggunaan biodiesel B20 untuk mesinnya demi memenuhi peraturan pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan 20 persen kandungan biodiesel lokal dalam solar.

“Kami sangat senang bahwa kini Indonesia mulai beralih ke biodiesel yang tentu sejalan dengan wawasan Volvo,” jelas Indra Wirawan selaku Marketing Communications and Retail Development Director PT Volvo Indonesia dalam keterangan resmi.

Dalam pandangan Volvo CE bahwa penggunaan biodiesel akan membantu mengurangi dampak merugikan bagi lingkungan yang disebabkan oleh emisi karbon dioksida, bahan partikulat, sulfur, dan hidrokarbon.

Seperti yang diketahui, pada akhir 2018 lalu pemerintah Indonesia mengenalkan mandatori B20 sebagai upaya untuk menekan angka impor migas sekaligus mengurangi dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap sektor industri. Volvo CE sendiri sudah cukup lama mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Sejak 2009, Volvo CE telah melakukan serangkaian inovasi seperti penggunaan bahan bakar terbarukan di mesin mereka. Ditambah dengan mengenalkan teknologi kendaraan listrik di beberapa modelnya, Volvo diyakini mampu menjadi pemain penting dalam industri yang berbasis pada lingkungan.

“Mesin buatan Volvo sebenarnya telah kompatibel dengan biodiesel sejak 2009. Kami senang bahwa pelanggan kami di Indonesia sekarang bisa ikut memanfaatkan teknologi biodiesel, sehingga tidak sebatas mengikuti anjuran pemerintah soal B20 namun juga dapat turut serta membangun lingkungan yang lebih baik,” terang Indra.

Saat ini, Volvo CE telah mengenalkan compact excavator bertenaga listrik pertama di dunia, EX2, yang dilengkapi dengan sistem penggerak listrik dan aktuator linear elektromekanis. Meskipun terlalu dini untuk mengatakan bahwa Volvo akan beralih sepenuhnya ke mesin listrik, namun Volvo percaya elektrifikasi bakal menjadi masa depan industri alat berat.

PT Trakindo Utama sebagai penyedia solusi alat berat Caterpillar di Indonesia, menyatakan unit mesin produknya cocok menggunakan B20. Managing Director PT Trakindo Utama, Ali R. Alhabsyi menuturkan Trakindo memastikan bahwa mesin-mesin dari Caterpillar telah siap menggunakan bahan bakar biodiesel dengan kadar campuran tertentu sesuai dengan model mesinnya. Sebab setiap mesin itu memiliki spesifikasi dan karakteristik yang berbeda. Langkah ini diambil guna memenuhi peraturan pemerintah terkait penggunaan B20 pada industri termasuk pada alat berat.

“Selain itu, kami memberikan pengertian kepada pelanggan agar tetap memperhatikan faktor-faktor seperti perawatan alat, kualitas bahan bakar, kebersihan bahan bakar, kandungan air, serta usia penyimpanannya. Dengan begitu dapat memaksimalkan penggunaan bahan bakar biodiesel seperti B20 pada unit yang mereka gunakan,” kata Ali Alhabsyi.

Menurutnya, kandungan energi yang dihasilkan B20 hanya lebih rendah antara 1%-2% dibandingkan solar biasa. “Untuk itu, perbedaan tersebut tidak signifikan mempengaruhi kinerja mesin produk kami,” ujarnya.

Sementara itu, Fahrudin Manager Marketing PT Gaya Makmur Tractors berpendapat serupa. Menurutnya,

belum ada komplain dari pihak customer terkait penggunaan bahan bakar B20. Tapi yang terjadi apabila BBM dipakai berkualitas buruk apapun itu jenisnya akan berpengaruh terhadap power engine. Biasanya akan terjadi low power dan umumnya solusi rutin penggantian fuel filter.

“Kalau sampai menyebabkan engine fail atau breakdown akibat B20, sejauh ini belum pernah terjadi. Masalah tersebut tidak pernah terjadi,” ujar Fahrudin.

Kalangan principal traktor seperti Manitou mengungkapkan pernyataan senada. Dwipa Hertanto, Area Sales Consultant Indonesia Manitou Group, menjelaskan bahwa penggunaan B20 ini akan berpengaruh kepada konsumsi bahan bakar dan tenaga unit alat berat. Akan tetapi untuk menjaga perawatan produk, dia menyarankan supaya memperhatikan perawatan tanki bahan bakar.

“Jadi, fuel tank di-flush dan filter diganti yang baru. Selanjutnya, mesin yang tanpa water separator agar dipasang,” ujarnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan program B20 telah berhasil menghemat devisa negara sebesar Rp 28,4 triliun sepanjang 2018. Penghematan ini terjadi karena impor Solar berkurang, digantikan dengan bahan bakar nabati.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menilai potensi minyak kelapa sawit yang ada sejalan dengan upaya Pemerintah memperluas kebijakan pemanfaatan bioenergi di semua sektor terutama transportasi dan pertambangan, untuk implementasi mandatori Biodiesel sebesar 20 persen (B20) dalam Bahan Bakar Minyak (BBM).(*)

APROBI IKUT MISI DAGANG KE AMERIKA SERIKAT



Pada 14-19 Januari 2019, pengurus Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) ikut misi dagang Indonesia ke Amerika Serikat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan ekspor non migas sebesar 7,5%.

Dipimpin Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita, misi dagang ini membahas sejumlah topik perdagangan dan bertemu pengusaha Amerika Serikat. “Kunjungan kerja ke AS ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mencapai ekspor non migas yang ditargetkan naik 7,5 persen dibandingkan tahun lalu, atau sebesar 175,9 miliar dolar AS,” kata Mendag dalam keterangan tertulis.

Enggartiasto Lukita menuturkan kunjungan kerja misi perdagangan itu adalah upaya untuk meningkatkan kinerja ekspor yang harus dilakukan sedini dan semaksimal mungkin di tengah kondisi pelambatan pertumbuhan ekonomi global.

Dengan target ekspor non migas yang mencapai 175,9 miliar dolar AS pada 2019, untuk periode Januari-November 2018 neraca perdagangan non migas tercatat surplus sebesar 4,64 miliar dolar AS.

Dalam periode tersebut, ekspor secara keseluruhan tumbuh positif sebesar 7,7 persen dengan nilai ekspor migas sebesar 15,65 miliar dolar dan ekspor non migas 150,14 miliar dolar. Dari data tersebut maka diharapkan ekspor non migas tahun ini dapat terus bertumbuh

dan berjalan sesuai target.

Enggar mengatakan, di tengah ketidakpastian ekonomi dan perdagangan global, kolaborasi dan kemitraan sangat penting untuk meningkatkan investasi dan perdagangan secara berkelanjutan. “Minyak kelapa sawit (CPO) merupakan salah satu fokus khusus dalam rangkaian kunjungan kerja kami ke AS,” ujarnya.

Dikatakan Enggartiasto bahwa Enggar berharap lewat forum tersebut terjadi dialog antara para pelaku usaha untuk memperkuat kemitraan, khususnya komoditas CPO. CPO dan produk turunannya dianggap memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia.

Paulus Tjakrawan, Ketua Harian APROBI, bersama pengurus lain ikut bertemu sejumlah asosiasi dan pengusaha asal Amerika Serikat. Paulus menyampaikan informasi positif seputar kelapa sawit dalam sesi khusus seminar sawit. Selain itu, misi dagang ini bermaksud melobi AS agar dapat menurunkan bea masuk biodiesel. Berdasarkan perhitungan APROBI, jika bea masuk biodiesel ke AS dihapuskan, maka ekspor biodiesel RI tumbuh hingga 20% dari tahun lalu.

Dengan forum bisnis dan business matching, diharapkan

para pengusaha dapat bertransaksi secara langsung sehingga dapat meningkatkan perdagangan kedua negara. Sebanyak 15 pengusaha akan turut dalam misi dagang kali ini. Pelaku usaha tersebut bergerak di sektor sawit, alumunium, baja, hasil laut, kedelai, gandum, tekstil, kopi, ban mobil, emas dan daging sapi. Selain itu, perwakilan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia, Indonesia Biofuels Producers Association (APROBI-IBPA), dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia juga turut serta dalam delegasi misi dagang itu.

Total perdagangan AS-RI dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan rata-rata 0,39 persen. Pada 2017, AS menjadi negara tujuan ekspor nonmigas Indonesia yang terbesar kedua setelah Cina, dengan nilai 17,1 miliar dolar AS. Produk ekspor utama RI ke AS, antara lain udang, karet alam, alas kaki, ban, dan pakaian wanita. AS tercatat menjadi negara sumber impor nonmigas terbesar kelima bagi Indonesia pada 2017, yakni senilai 7,7 miliar dolar AS. Produk utama impor AS: kedelai, kapas, gandum, residu pabrik tepung dan makanan olahan untuk hewan. (*)

Peter F Gontha, Staf Khusus Menteri Luar Negeri RI

EROPA INGIN TEKAN DEFISIT PERDAGANGAN

Kampanye hitam sawit aktif digalang kalangan media dan NGO di Eropa. Masyarakat Indonesia seharusnya bersatu untuk menghadapi kebijakan diskriminasi sawit. Karena akan berdampak bagi perdagangan ekspor.

Hambatan dagang melalui kebijakan dan regulasi yang dijalankan Eropa, sudah seringkali diterapkan kepada sawit. Tujuannya untuk menekan defisit neraca perdagangan antara Eropa dan Indonesia. Hal ini diungkapkan Peter Gontha, Staf Khusus Menteri Luar Negeri RI dalam sebuah diskusi di akhir Maret 2019. Ia menduga diskriminasi yang dijalankan Eropa kepada sawit untuk mempersempit defisit neraca perdagangannya dengan RI.

Merujuk data Kementerian Perdagangan RI, nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa di tahun 2018 senilai US\$ 17,1 miliar. Sedangkan, nilai impor sebesar

US\$ 14,1 miliar. Ini berarti, Indonesia mencatat surplus perdagangan sekitar US\$ 3 miliar.

"Dengan surplus perdagangan Indonesia sebesar US\$ 3 miliar. Apakah ini merupakan upaya menghambat sawit dalam rangka menurunkan defisit neraca dagang mereka?," ujar penggemar Peter.

Di sisi lain, kata Pieter, Media di Uni Eropa juga mendukung anti sawit. Hanya Prancis, negara Uni Eropa pertama yang menolak produk sawit. Sedangkan di Indonesia ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung.

"Prancis, mengeluarkan UU tidak boleh ada minyak nabati sunflower dari luar Prancis. Padahal, EU belum memutuskan. Ini adalah politik, Macron koalisi. Jadi Menteri ada dari Green Party. Sehingga Prancis harus mengakomodir kepentingannya," ia menjelaskan.

Lebih lanjut, Peter menjelaskan bahwa saat ini tidak ada keanekaragaman hayati hutan di Eropa. Melainkan, hanya ada hutan di mana setiap musim panas dilepas kelinci. Tujuannya memenuhi kegiatan orang kaya berburu.

Ia mengatakan pemerintah sudah bagus dalam berdiplomasi untuk memenangkan kepentingan nasional

menyangkut industri kelapa sawit ke dunia luar. "Harusnya seluruh komponen masyarakat bisa lebih bersatu untuk kampanye mengenai pentingnya palm oil demi kepentingan nasional yang lebih besar."

Peter F Gontha menegaskan Indonesia belum akan mengambil langkah tindakan balasan (retaliasi) kepada Uni Eropa yang berencana melarang penggunaan minyak sawit (*crude palm oil/CPO*) Indonesia.

"Kami belum mau retaliasi. Kami mau lihat dulu bagaimana keputusan daripada Uni Eropa. Baru akan mengambil tindakan bila sudah ada keputusan," kata Peter.

"Kita perlu persatuan bersama. Kalau di Indonesia ada yang dukung, ada yang enggak. Saya mengajak mendukung sawit ini. Perlawanan kita melawan Uni Eropa harus dilakukan," tambahnya.

Penggemar jazz ini menyarankan supaya diplomat Indonesia dapat memainkan perannya. Selain itu, pemerintah dapat merangkul berbagai pihak untuk memengaruhi keputusan Eropa. Langkah lainnya, Indonesia perlu menggertak negara-negara di Benua Biru. Apalagi, mereka punya kepentingan ekonomi di Indonesia.

"Contoh Indonesia pengadaan bus Transjakarta mereka Scania, dari Swedia. Bisa saja, kita tunda dulu selama Eropa mendiskriminasi sawit kita," pungkasnya. (*)



SAWIT BUKAN PENYEBAB UTAMA DEFORESTASI

Definisi Uni Eropa mengenai tuduhan deforestasi oleh perkebunan sawit, tidaklah tepat. Mengingat sawit ini tanaman paling efisien dalam penggunaan lahan dan tinggi produktivitasnya.

Di depan sejumlah wartawan dan pelaku usaha, Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menerangkan persoalan deforestasi yang kerap kali dituduhkan kepada perkebunan sawit. Selama ini, Uni Eropa memberlakukan definisi deforestasi yang berbeda dengan kondisi di Indonesia.

Dijelaskan Joko bahwa tuduhan deforestasi Uni Eropa terhadap perkebunan sawit perlu ditinjau kembali, dengan merujuk kepada kriteria Food Agriculture Organisation (FAO) dan regulasi pemerintah Indonesia. Berdasarkan definisi deforestasi oleh FAO hanya mengacu pada foto citra satelit yang menggambarkan perubahan penggunaan lahan dari hijau ke coklat di peta. Tetapi acuan tidak merinci profil serta fungsi lahan secara basis pendataan yang sesuai dengan aturan di suatu wilayah.

Sementara Indonesia, kata dia, menganut paham deforestasi yang mengacu pada basis pemahaman hutan melalui undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya.

"Sekarang justru, Mahkamah

Konstitusi sudah menetapkan bahwa yang disebut dengan hutan itu tidak boleh lagi ditunjuk, tapi harus ditetapkan. Artinya, harus diukur dulu luas lahannya, lahan apa itu, dan lain sebagainya," kata Joko.

Sejauh ini, profil lahan sawit yang ada di Indonesia mayoritasnya telah melalui legalitas yang sah, yang sesuai dengan peraturan yang ada. Merujuk aturan perundang-undangan, ketentuan penggunaan lahan dibedakan dari ketentuan kawasan hutan maupun bukan kawasan hutan.

GAPKI mencatat perkebunan kelapa sawit di seluruh dunia hanya menggunakan 17,32 juta hektare. Jumlah tersebut hanya 6 persen dari total luas lahan perkebunan minyak nabati dunia seluas 278,2 juta hektare.

Joko Supriyono membantah bahwa perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab utama deforestasi, seperti yang dituduhkan Uni Eropa. Faktanya, komoditas minyak nabati lainnya, seperti kedelai menggunakan lahan lebih banyak dari kelapa sawit. "Sekitar 17 juta hektare lahan sawit dari 278 juta hektare kebun minyak nabati. Kalau dibilang sawit penyebab utama deforestasi, justru lahan tanaman kedelai lebih besar dalam pemakaian lahan sekitar 110

juta hektare lahan," ujarnya.

Prof. Yanto Santosa, Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, mengakui bahwa tuduhan deforestasi sawit oleh Uni Eropa karena ada perbedaan terminologi definisi soal deforestasi itu sendiri. Selain itu, deforestasi tidak bisa diartikan bersifat negatif terus. Karena deforestasi dapat bermakna positif apabila menggunakan pola Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai bentuk kedaulatan bangsa.

"Tidak bisa suatu kebun dituduh deforestasi, tanpa melihat riwayat dan profil sebelumnya. Karena setiap kebun punya riwayat berbeda bergantung kepada kebijakan wilayah serta adat istiadat," ujarnya.

Saat ini, produksi minyak nabati dunia mencapai 205,9 juta ton yang terdiri dari berbagai komoditas, seperti *sunflower* (bunga matahari), *rapeseed*, *soybean* (kacang kedelai) dan kelapa sawit. Dari seluruh minyak nabati, minyak sawit merupakan komoditas paling efisien dalam penggunaan lahan, yakni dari lahan seluas 17,32 juta hektare, menghasilkan 56,65 juta ton atau menyumbang 40 persen dari total produksi minyak sawit global.

Sementara itu, minyak nabati dari kacang kedelai menghasilkan 48,23 juta ton dari luasnya lahan 110,36 hektare. Tapi hingga sekarang, kedelai tetap aman dari tuduhan deforestasi oleh Uni Eropa.